ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam merespons kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit pada periode 2018–2024. Kebijakan RED II memasukkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC), sehingga membatasi penggunaannya dalam sektor energi terbarukan Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada penurunan ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional yang bergantung pada industri sawit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Bayne dan Woolcock serta Maaike Okano-Heijmans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan berbagai strategi diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasionalnya, yaitu dengan mengatasi narasi negatif terhadap kelapa sawit melalui forum internasional dan kampanye publik, membangun sinergi dengan pelaku usaha sawit nasional, memanfaatkan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sebagai sarana diplomasi regional, memperkuat penerapan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta melakukan negosiasi langsung dengan Uni Eropa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menggunakan pendekatan konfrontatif, tetapi juga mengombinasikannya dengan diplomasi kooperatif untuk mempertahankan akses pasar dan meningkatkan citra keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia di tingkat internasional.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, *Renewable Energy Directive II*, Kelapa Sawit, Uni Eropa, Indonesia, ISPO.

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesia's strategy in responding to the European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) policy on palm oil commodities during the period 2018–2024. RED II classifies palm oil-based biofuel as a high-risk feedstock associated with Indirect Land Use Change (ILUC), resulting in restrictions on its use within the European Union's renewable energy sector. The policy has contributed to a decline in Indonesian palm oil exports to the European market and poses potential challenges to Indonesia's economy, which significantly relies on the palm oil industry. This research employs a qualitative method with data collected through library research. The analysis is based on the concept of economic diplomacy proposed by Bayne and Woolcock as well as Maaike Okano-Heijmans. The findings reveal that Indonesia implemented several economic diplomacy strategies to safeguard its national interests. These strategies include countering negative narratives surrounding palm oil through international forums and public campaigns, strengthening cooperation with domestic palm oil stakeholders, utilizing the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) as a platform for regional diplomacy, enhancing the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system, and conducting direct negotiations with the European Union. The study concludes that Indonesia combined both confrontational and cooperative diplomatic approaches to maintain market access and improve the international perception of the sustainability of its palm oil industry.

***Keywords**: Economic Diplomacy, Renewable Energy Directive II, Palm Oil, European Union, Indonesia, ISPO.*